



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN 2022**





WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2022.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.



### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

### Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

### Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

### BAB III

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 24





# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112  
Telepon (0536) 4210345, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.1/ 360.B /DPM-PTSP/VIII/2021

#### TENTANG

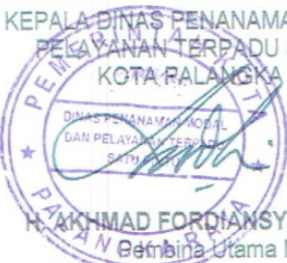
#### PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,  
  
H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya
2. Wakil Walikota Palangka Raya
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
6. Inspektur Kota Palangka Raya

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diselesaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini ditekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional secara lebih rinci dan diharapkan adanya pengintegrasian antara sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem manajemen kinerja sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *planning, programming and budgeting system (PPBS)*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP  
Gubernur Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I     PENDAHULUAN ..... 1

    1.1   Latar Belakang ..... 1

    1.2   Landasan Hukum ..... 2

    1.3   Maksud dan Tujuan ..... 3

    1.4   Sistematika Penulisan ..... 4

BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2020 ..... 5

    2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian  
            Renstra SKPD ..... 5

    2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..... 5

    2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 7

    2.4   Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 7

    2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 19

BAB III   TUJUAN DAN SASARAN SKPD ..... 20

    3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 20

    3.2   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 20

    3.3   Program dan Kegiatan ..... 21

BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD ..... 24

BAB V     PENUTUP ..... 30

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, *Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.* Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rancangan Akhir Renja tahun 2022 adalah Rancangan Akhir Renja periode tahun keempat dan disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD terdiri dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD

Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dan indikatif dalam Renja SKPD.

Selanjutnya rancangan Renja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappedalitbang, yang mencakup penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan

target kinerja program dan kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008-2028.
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota palangka Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek (kurun waktu 1

tahun) untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

**b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2020
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
2.2	Analisis Kinerja Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SKPD
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB V	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **TAHUN 2020**

##### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Palangka Raya dapat dilihat pada lampiran.

##### **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang telah disusun, maka berikut disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Palangka Raya**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,95	83,95	84,95	85,96	80	-	84,95	85,95	Untuk Tahun n-2 Indikator tidak dapat dicantumkan karena mengikuti Perubahan RPJMD Tahun 2010-2023
2	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)			-	3,41	3,95	4,23	-	-	3,95	4,23	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang pelayanan perizinan, adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya).
2. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Masih rendahnya komitmen aparatur penyelenggara perizinan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses penerbitan perizinan.
5. SOP yang ada belum dilaksanakan secara ketat.
6. Masih rendahnya kesadaran penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
7. Anggaran yang tersedia masih belum memadai.

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai DPM-PTSP Kota Palangka Raya melakukan strategi antara lain :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur penanaman modal dan aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan.
2. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi dengan didukung operator yang terampil dan berintegritas.
3. Pendataan terhadap kegiatan penanaman modal.
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal secara teratur dan berkelanjutan.

### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd

Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel T.C.31

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6.596.915.503</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6.596.915.503</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>30.000.000</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	30 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	30 dokumen	20.000.000	



1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dokumen	10.000.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5.161.098.765</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5.161.098.765</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	14 bulan	5.126.098.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	14 bulan	5.126.098.765	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	4 dokumen	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	4 dokumen	10.000.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 laporan	25.000.000	

1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Ketersediaan Data Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>91.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Ketersediaan Data Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>91.000.000</b>	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Dibeli	80 stell	56.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Dibeli	80 stell	56.000.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 orang	35.000.000	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>359.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>359.000.000</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Komponen Instalansi Listrik yang Dibeli	6 jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Komponen Instalansi Listrik yang Dibeli	6 jenis	10.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48 jenis	154.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48 jenis	154.000.000	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	5 jenis	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	5 jenis	15.000.000	

1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Makanan dan Minuman yang dibeli serta Rapat Koordinasi Yang Diikuti	1 tahun	180.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Makanan dan Minuman yang dibeli serta Rapat Koordinasi Yang Diikuti	1 tahun	180.000.000	
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja</b>	95%	-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja</b>	95%	-	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Tersedianya Lemari Arsip	5 buah	-	Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Tersedianya Lemari Arsip	5 buah	-	
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	12 bulan	740.000.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	12 bulan	740.000.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan	36 bulan	240.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan	36 bulan	240.000.000	

16.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Terpenuhinya Kewajiban Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Terpenuhinya Kewajiban Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	500.000.000	
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya</b>	<b>12 bulan</b>	<b>215.816.738</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya</b>	<b>12 bulan</b>	<b>215.816.738</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	10 unit	135.816.738	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	10 unit	135.816.738	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	12 bulan	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	12 bulan	30.000.000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah dan Jenis Sarana Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah dan Jenis Sarana Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 unit	50.000.000	



2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif</b>	<b>40%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif</b>	<b>40%</b>	<b>100.000.000</b>	
2.1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha</b>	<b>1 perda</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha</b>	<b>1 perda</b>	<b>50.000.000</b>	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 perda	-	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 perda	-	
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 kegiatan	50.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 kegiatan	50.000.000	

2.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi</b>	<b>1 aplikasi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi</b>	<b>1 aplikasi</b>	<b>50.000.000</b>	
-----	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--

			<b>Berbasis GIS</b>					<b>Berbasis GIS</b>			
2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Tersedianya Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis GIS	1 aplikasi	50.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Tersedianya Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis GIS	1 aplikasi	50.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan PMDN</b>	<b>25%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan PMDN</b>	<b>25%</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	<b>2 pameran</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	<b>2 pameran</b>	<b>200.000.000</b>	
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Buku Panduan Strategi Promosi Kota Palangka Raya	-	-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Buku Panduan Strategi Promosi Kota Palangka Raya	-	-	
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Keikutsertaan Dalam Pameran Investasi Dalam Negeri	2 kegiatan	200.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Keikutsertaan Dalam Pameran Investasi Dalam Negeri	2 kegiatan	200.000.000	

4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>84,95</b>	<b>223.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>84,95</b>	<b>223.000.000</b>	
4.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>223.000.000</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>223.000.000</b>	
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	4 laporan	100.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	4 laporan	100.000.000	

4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan, Lingkungan, Perizinan Bangunan dan Perizinan Krontruksi dan Penataan Ruang'	4 laporan	23.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan, Lingkungan, Perizinan Bangunan dan Perizinan Krontruksi dan Penataan Ruang'	4 laporan	23.000.000	
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Palangka Raya	Jumlah Pengaduan yang dilayani dan ditindaklanjuti	100%	100.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Palangka Raya	Jumlah Pengaduan yang dilayani dan ditindaklanjuti	100%	100.000.000	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>	<b>30%</b>	<b>335.173.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>	<b>30%</b>	<b>335.173.000</b>	

5.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>335.173.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>335.173.000</b>	
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	73.754.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	73.754.500	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	219.158.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	219.158.500	
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	42.260.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 kegiatan	42.260.000	



6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	
6.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>80.000.000</b>	
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Data Investasi Berbasis Sistem Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	80.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Tersedianya Data Investasi Berbasis Sistem Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	80.000.000	

**2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjangkau aspirasi terkait kebutuhan dan harapan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan sejak tingkat Kelurahan hingga tingkat Kecamatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

## TUJUAN DAN SASARAN SOPD

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Carta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Kebijakan dan program prioritas nasional dimaksud merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Tema RKP tahun 2022 adalah **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif.”** Dalam Rancangan RKP Tahun 2022 dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020 – 2024), meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup, terdapat 10 major project yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022, yaitu: Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPM-PTSP

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) DPM - PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan Renja SKPD

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
3. Mengurangi potensi penyelewengan dalam proses pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
4. Terselenggaranya monitoring penanaman modal;

5. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal.

**b. Sasaran RENJA SKPD**

1. Tersedianya layanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang tepat waktu, ramah dan sopan, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta fasilitas pendukung yang nyaman dan memadai;
2. Tersedianya sistem informasi/aplikasi pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal, dapat dipercaya (*reliable*) dan terjamin/aman (*secure*);
3. Tersedianya data perkembangan pelaksanaan penanaman modal;
4. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan melalui pendidikan formal dan diklat teknis fungsional serta kegiatan orientasi lainnya.

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2022**

Pada renja Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya telah mengakomodir Peraturan Menteri Dalam negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimaksud DPM-PTSP merencanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar **Rp. 7.535.088.503,- ( Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah)** dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Palangka Raya terlihat pada lampiran tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 sedangkan rincian program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
  - 2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

**c. Program Promosi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**



1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
  - 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal
  - 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
  1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
    - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
    - 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
  1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Prioritas dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMD Periode ke – 3 Tahun 2018-2023 yaitu dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, maka Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan pada lampiran.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pagu indikatif. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Renja Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 yang telah mengalami revisi dan menjadi pedoman untuk persiapan dan perencanaan kegiatan serta rencana aksi bagi bidang-bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renja DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2022 terdiri dari 6 program dan 28 kegiatan yang semuanya merupakan usulan dari DPM-PTSP dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 7.535.088.503,-** yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan efisiensi dan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Palangka Raya seperti Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terlampir.

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022**

						Tahun 2022														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
											Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18						7,535,088,503								7,039,394,259					
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Bulan		Bulan	12 Bulan	6,596,915,503			12 Bulan	6,569,394,259				
2	18	01	2.0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	40,000,000				
2	18	01	2.0 1	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedian nya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA				30 Dokumen	20,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	30 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 1	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	5,161,098,765						12 Bulan	4,225,757,017	
2	18	01	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar				14 Bulan	5,126,098,765	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	14 Bulan	4,155,757,017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 2	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas				4 Dokumen	10,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 2	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan, Trwulan dan Semesterl				18 Laporan	25,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	18 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Data Kepegawaian	persen		persen	100 persen	91,000,000						100 persen	130,000,000	
2	18	01	2.0 5	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Dibeli				80 stell	56,000,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	80 stell	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 5	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				20 Orang	35,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	20 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	18	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	359,000,000					12 bulan	193,637,242		
2	18	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli				6 Jenis	10,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	6 Jenis	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor				48 Jenis	154,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	48 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan				5 Jenis	15,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	5 Jenis	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman yang di beli serta Rapat Koordinasi yang di ikuti				1 tahun	180,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	1 tahun	163,637,242	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja	persen		persen	95 persen	0						95 persen	0	
2	18	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari arsip				5 buah	0	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	5 buah	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	740,000,000						12 bulan	1,635,000,000	
2	18	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik setiap bulan				36 Bulan	240,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	36 Bulan	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kewajiban Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	12 Bulan	1,460,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	bulan		bulan	12 bulan	215,816,738						12 bulan	345,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	18	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang terpelihara				10 unit	135,816,738	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	10 unit	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin				12 Bulan	30,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	12 Bulan	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis sarana gedung kantor yang terpelihara				1 unit	50,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	1 unit	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	%		40 %	100,000,000						40 %	100,000,000	
2	18	02	2.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	Perda	Perda		1 Perda	50,000,000						1 Perda	50,000,000	
2	18	02	2.0 1	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal				1 perda	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	1 perda	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.0 1	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi pelaksanaan peeraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Mpda;				1 kegiatan	50,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	1 kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	Aplikasi	Aplikasi		1 Aplikasi	50,000,000						1 Aplikasi	50,000,000	
2	18	02	2.0 2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Investasi berbasis GIS				1 aplikasi/Paket	50,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	1 aplikasi/Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	%		25 %	200,000,000						25 %	50,000,000	
2	18	03	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Pameran	Pameran		2 Pameran	200,000,000						2 Pameran	50,000,000	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	03	2.0 1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Buku Panduan Strategi Promosi Kota Palangka Raya				0 Dokumen/ Buku	0	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M352)	0	0 Dokumen/ Buku	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.0 1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keikutsertaan dalam Pameran Investasi Dalam Negeri				2 kegiatan	200,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M257)	0	2 kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	84.95 %	223,000,000						84.95 %	165,000,000	
2	18	04	2.0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	223,000,000						100 Persen	165,000,000	
2	18	04	2.0 1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan jasa usaha berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik				4 Laporan	100,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M257)	0	4 Laporan	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.0 1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan, Lingkungan, Perizinan Bngunan, dan Perizinan Konstruksi dan Penata an Ruang				4 Laporan	23,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M257)	0	4 Laporan	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.0 1	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang dilayani dan di tindak lanjuti				100 %	100,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M257)	0	100 %	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%		%	30 %	335,173,000						30 %	130,000,000	
2	18	05	2.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bulan		Bulan	12 Bulan	335,173,000						12 Bulan	130,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 kegiatan	73,754,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 kegiatan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 kegiatan	219,158,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	4 kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 kegiatan	42,260,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	4 kegiatan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	%		%	100 %	80,000,000						100 %	25,000,000	
2	18	06	2.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data/Pelaporan Investasi Penanaman Modal	Bulan		Bulan	12 Bulan	80,000,000						12 Bulan	25,000,000	
2	18	06	2.0 1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data Investasi Berbasis Sistem Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	80,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	0	10 Dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL											7,535,088,503							7,039,394,259	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palangka Raya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diperlukan guna perencanaan tahun berikutnya, dengan berpedoman pada dokumen RKPD, RENSTRA, RPJMD maupun visi dan misi Walikota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Pada akhirnya Rencana Kerja ini disusun kembali dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Semoga kiranya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

# LAMPIRAN

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan Tahun 2021 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d TW II Tahun 2021 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d TW II Tahun 2021 Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)
	Urusan									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan Penujang Kegiatan Pemerintah (Bulan)</b>	<b>36,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>300%</b>

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00	2,00	2,00	6,00	300	35	43,00	2150%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00	1,00	2,00	3,00	150	1	5	500%
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,44</b>	<b>93,44</b>	<b>12</b>	<b>205,44</b>	<b>205%</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) (Bulan)	36,00	12,00	12,00	12,00	100	14	38	317%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan)	36,00	12,00	4,00	12,00	300	4	28	233%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	42,00	14,00	14,00	12,00	86	18	44	314%



				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kepegawaian (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>- ,00</b>	<b>- ,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	61,00	- ,00	18,00	0	0	16	16	0
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebutuhan Kerja (Bulan)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- ,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>112</b>	<b>112%</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli (Jenis/Buah) (Bulan)	18,00	6,00	6,00	6	100	6	18	300%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli (jenis)	144,00	48,00	51,00	0	0	51	99	206%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan (Bulan)	26,00	12,00	5,00	0	0	5	17	142%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti serta Konsumsi Rapat yang Dibeli (kali)			- ,00	- ,00	0	0	0	0
					Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah	88,00	24,00	24,00	24,00	100,0	24	72	300%
					Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0	1	13	217%
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Berjalannya Kegiatan Perkantoran Secara Maksimal (Bulan)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300%</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Setiap Bulan (Bulan)	36,00	12,00	36,00	36,00	100	36	84	700%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Administrasi Keuangan (jenis)			5,00	100,00	2000		100	0
					Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan (orang)	24,00	12,00		100,00	2000	15	127	1058%
					Jumla SDM kebersihan yang terbayar	36,00	12,00		100,00	2000	12	124	1033%

[illegible]

				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1,00	0	1,00	1,00	100	1	2	0
				<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif (%)</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi Potensi Investasi Berbasis GIS (Unit)	3,00	0	1,00	15,00	1500	1	16	0
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Investasi PMDN (%)</b>	<b>35,00</b>		<b>15,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Investasi PMDN (%)</b>								
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya buku panduan strategi promosi kota palangka raya (dokumen)	1,00	0		12	0	1	13	0
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Teraksananya keikutsertaan dalam pameran investasi dalam negeri	6,00	2		2	0	2	6	300%

				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)</b>	<b>85,96</b>	<b>1</b>	<b>83,95</b>	<b>80</b>	<b>95,29</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>8300%</b>
				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha Berkas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)	36,00		4,00	0	0	4	4	0
					Indeks KEpuasan Masyarakat (point)	82,96	80	82,96	80	96,43	83,95	243,95	305%
					Jumlah Izin yang terbit sektor Perdagangan (Izin)	1.336	1070	1.336	1070	80,09	0	2140	200%
					Jumlah Izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum (Izin)	6.212	5413	6.212	5413	87,14	0	10826	200%
					Jumlah Izin yang terbit sektor Kesehatan, Lingkungan, Penelitian (Izin)	2.181	838	2.181	838	38,42	0	1676	200%

				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan Lingkungan, Perizinan Bangunan, dan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang (Laporan)	9,00	100	4,00		0	4	104	104%
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%)	100,00	75	75,00	6,44	8,59	12	93,44	125%
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	45,00	100	20,00	1,13	5,65	20	121,13	121%
				<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Laporan Peningkatan Penanamn Modal (%)		12			0	20	32	267%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Pemantauan Pelaksanaan PenanamanModal (Laporan)	3,00		4,00	4	100	4	8	0

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Pembinaan Pelaksanaan PenanamanModal (Laporan)	3,00	11	4,00	11	275		26	236%
					Terselenggaranya sosialisasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal (peserta)	200,00	100	100,00	12	12		116	116%
					Tersedianya bahan cetakan informasi pengendalian penanaman modal (expl)	400,00	400	400,00	12	3		416	104%



**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kota Palangka Raya**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.535.088.503				7.039.394.259	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHA KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan		12 bulan	6.596.915.503			12 bulan	6.569.394.259	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bulan	30.000.000			12 bulan	40.000.000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	30 dokumen	20.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		30 dokumen	30.000.000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 dokumen	10.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		1 dokumen	10.000.000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		12 bulan	5.161.098.765			12 bulan	4.225.757.017	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	14 bulan	5.126.098.765	[Dana Khusus]-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	4.155.757.017	

2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 dokumen	10.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		4 dokumen	20.000.000
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	18 laporan	25.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		18 laporan	50.000.000
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Data Pegawai</b>		<b>100%</b>	<b>91.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Dibeli	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	80 stell	56.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		80 stell	100.000.000
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	20 orang	35.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		20 orang	30.000.000
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>		<b>12 bulan</b>	<b>359.000.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>193.637.242</b>
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalansi Listrik yang Dibeli	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	6 jenis	10.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		6 jenis	10.000.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	48 jenis	154.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		48 jenis	-
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	5 jenis	15.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		5 jenis	20.000.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman yang dibeli serta Rapat Koordinasi Yang Diikuti	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 tahun	180.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		1 tahun	163.637.242
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja</b>		<b>95%</b>	<b>-</b>			<b>95%</b>	<b>-</b>

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Lemari Arsip	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	5 buah	-	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		5 buah	-
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>		<b>12 bulan</b>	<b>740.000.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>1.635.000.000</b>
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	36 bulan	240.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		36 bulan	175.000.000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kewajiban Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	12 bulan	500.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		12 bulan	1.460.000.000
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya</b>		<b>12 bulan</b>	<b>215.816.738</b>			<b>12 bulan</b>	<b>345.000.000</b>
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	10 unit	135.816.738	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		10 unit	120.000.000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	12 bulan	30.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		12 bulan	75.000.000
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 unit	50.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		1 unit	150.000.000
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif</b>		<b>40%</b>	<b>100.000.000</b>			<b>40%</b>	<b>100.000.000</b>
2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha</b>		<b>1 perda</b>	<b>50.000.000</b>			<b>1 perda</b>	<b>50.000.000</b>

2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 perda	-	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		1 perda	-
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 kegiatan	50.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		1 kegiatan	50.000.000
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS</b>		1 aplikasi	50.000.000			1 aplikasi	50.000.000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Tersedianya Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis GIS	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	1 aplikasi	50.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		1 aplikasi	50.000.000
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan PMDN</b>		25%	200.000.000			25%	50.000.000
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri</b>		2 pameran	200.000.000			2 pameran	50.000.000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Buku Panduan Strategi Promosi Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	-	-	[Dana Khusus]-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Keikutsertaan Dalam Pameran Investasi Dalam Negeri	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	2 kegiatan	200.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		2 kegiatan	50.000.000
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		84,95	223.000.000			84,95	165.000.000

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal		100%	223.000.000			100%	165.000.000
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 laporan	100.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		4 laporan	40.000.000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan, Lingkungan, Perizinan Bangunan dan Perizinan Krontruksi dan Penataan Ruang'	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 laporan	23.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		4 laporan	75.000.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Pengaduan yang dilayani dan ditindaklanjuti	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	100%	100.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		100%	50.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		30%	335.173.000			30%	130.000.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		12 bulan	335.173.000			12 bulan	130.000.000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 kegiatan	73.754.500	[Dana Khusus]-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Nonfisik		4 kegiatan	30.000.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 kegiatan	219.158.500	[Dana Khusus]-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	50.000.000

2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	4 kegiatan	42.260.000	[Dana Khusus]-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Nonfisik		4 kegiatan	50.000.000
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal</b>		<b>12 bulan</b>	<b>80.000.000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>25.000.000</b>
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data Investasi Berbasis Sistem Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palangka Raya, Semua Kec., Semua Kel.	10 dokumen	80.000.000	[Dana Umum]- Dana Transfer Umum- Alokasi Umum		10 dokumen	25.000.000